

LAPORAN



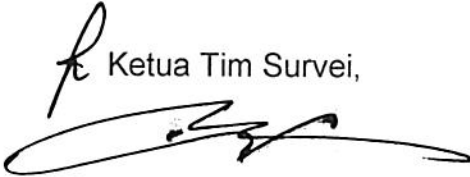
**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

**TRIWULAN III
PERIODE JULI - SEPTEMBER 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TRIWULAN II PERIODE JULI - SEPTEMBER 2022
DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Disahkan di Pangkalan Balai
Pada Hari Jumat, 30 September 2022

Ketua Tim Survei,


WARNO, S H.
NIP. 19670904 199103 1 003

Megetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,




SILVIANI, S.H., M.H.
NIP. 19760929 200112 2 006

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	5
BAB III	7
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	7
3.1. Profil responden	7
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	20
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	21
BAB IV	23
PENUTUP	23
4.1. Kesimpulan	23
4.2. Rekomendasi	23
LAMPIRAN	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) Pada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara

mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu dari 01 Juli – 30 September 2022 dan diperoleh 89 responden.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim pengawas/Penanggunjawab survei akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan

mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

BAB II
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

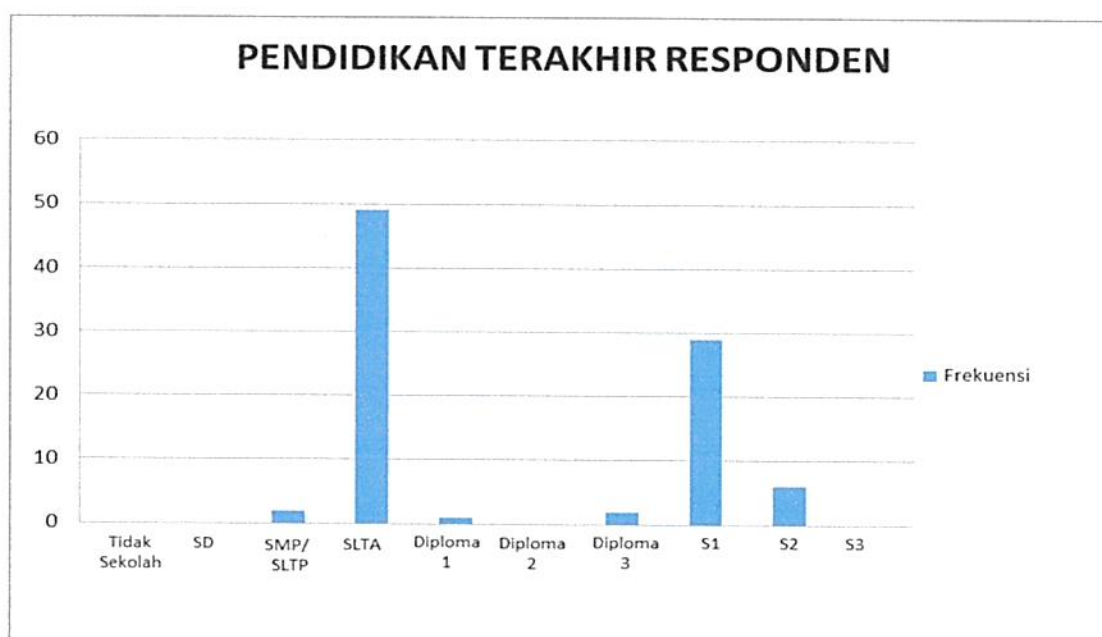
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II mayoritas memiliki latar SMA sebanyak 49 (54,88%) responden.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	2	2,24
4	SMA	49	54,88
5	D1	1	1,12
6	D2	0	0
7	D3	2	2,24
8	S1	29	32,48
9	S2	6	6,72
10	S3	0	0
JUMLAH		89	100

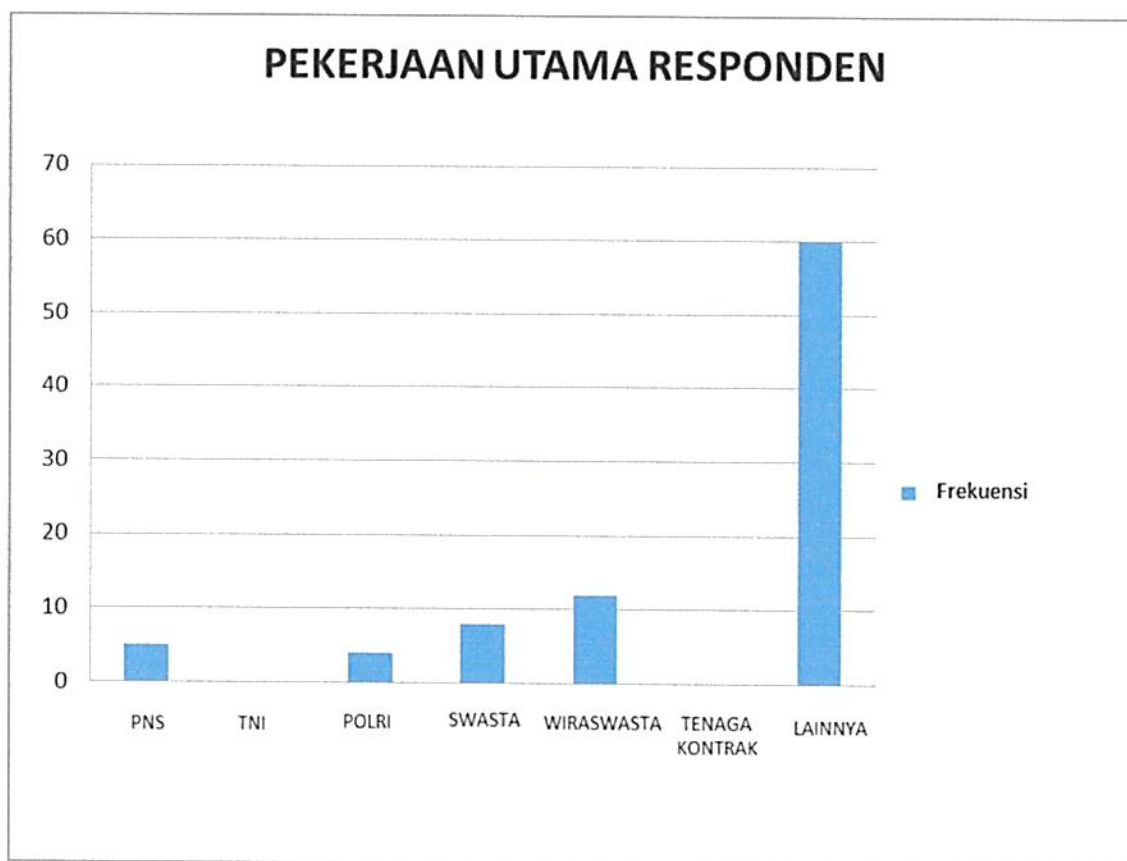


3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 60 (67,2%) responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki pekerjaan Lainnya.

Tabel 5.
JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

NO	PEKERJAAN UTAMA	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	PNS	5	5,6
2	TNI	0	0
3	POLRI	4	4,48
4	SWASTA	8	8,96
5	WIRUSAHA	12	13,44
6	TENAGA KONTRAK	0	0
7	LAINNYA	60	67,2
JUMLAH		89	100

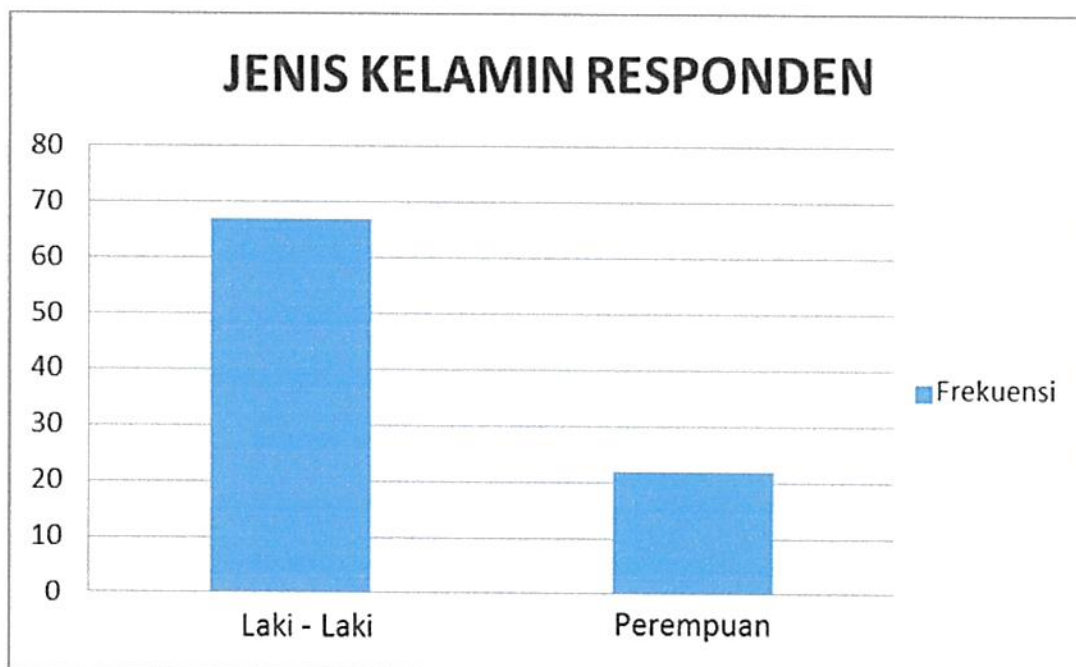


3.1.3. Jenis Kelamin

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 67 (75,04%) responden.

Tabel 6
Jenis Kelamin Responden

NO	Jenis Kelamin	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Laki-laki	67	75,04
2	Perempuan	22	24,64
JUMLAH		89	100

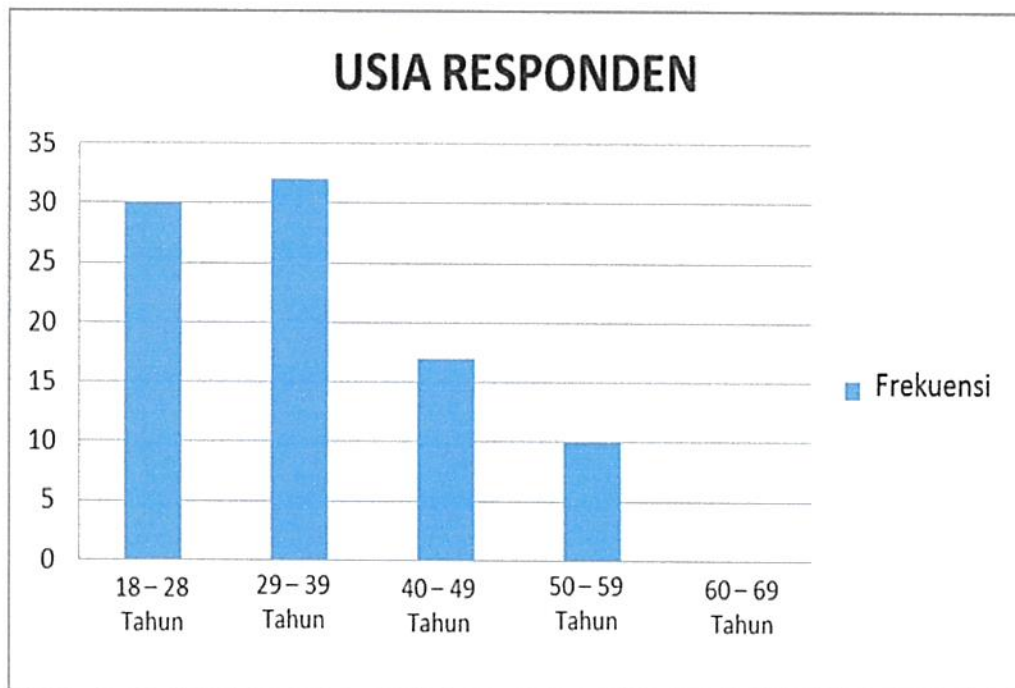


3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun dengan jumlah 32 (35,96%) responden.

Tabel 7.
USIA RESPONDEN

NO	UMUR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1.	18 – 28 Tahun	30	33,71
2.	29 – 39 Tahun	32	35,96
3.	40 – 49 Tahun	17	19,10
4.	50 – 59 Tahun	10	11,24
5.	60 – 69 Tahun	0	0,0
Jumlah		105	100



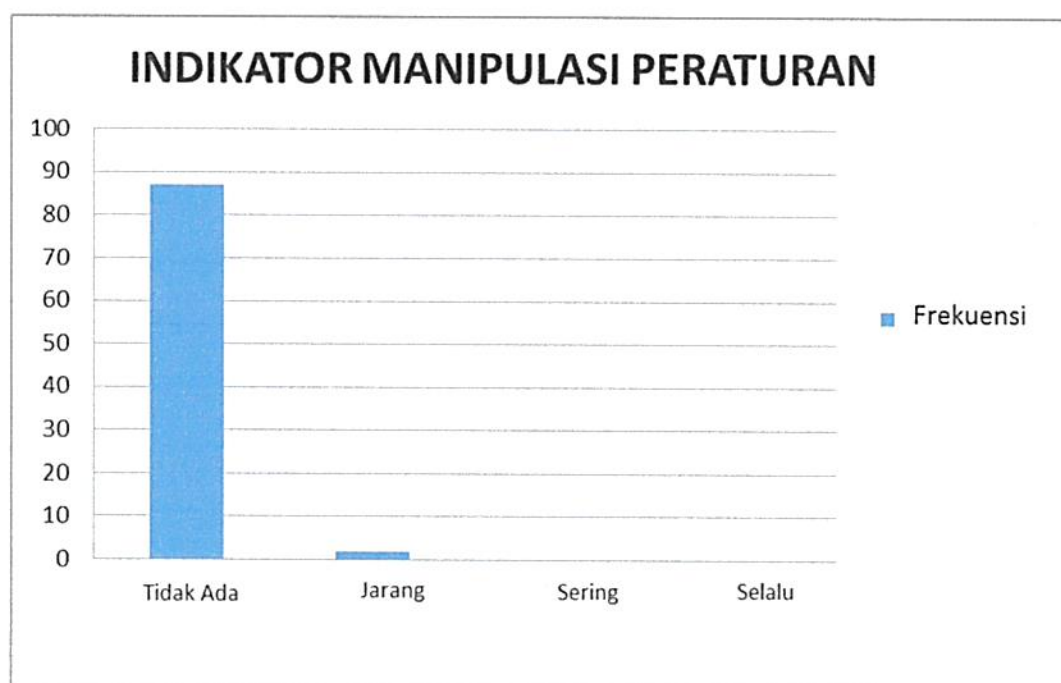
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan "88 (98,56%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Selalu Sesuai Dengan Prosedur (A)" pada index rata – rata skor sebesar "3,989" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 9.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu Sesuai Prosedur	A	4	88	98,56
2	Sering Sesuai Prosedur	B	3	1	1,12
3	Jarang Sesuai Prosedur	C	2	0	0
4	Tidak Sesuai Prosedur	D	1	0	0
JUMLAH				89	100

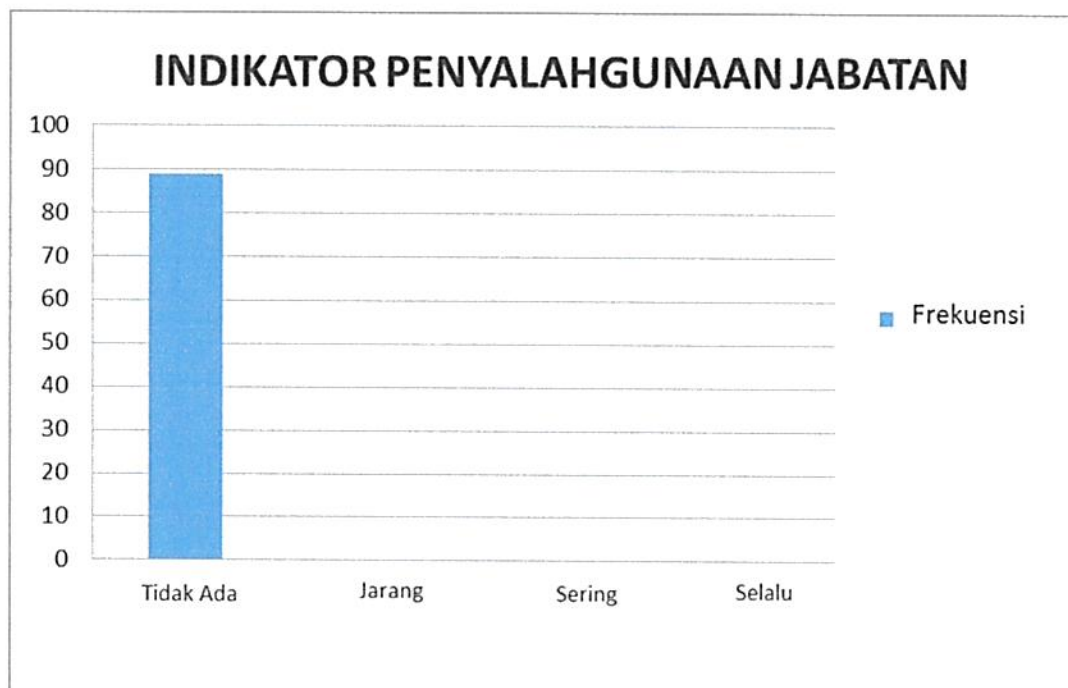


3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan **"89 (100%)"** dari jumlah responden memilih jawaban **"Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)"** pada index rata – rata skor sebesar **"4,00"** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik"**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **"Sangat Baik"**.

Tabel 10.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	A	4	89	100
2	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	B	3	0	0
3	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	C	2	0	0
4	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	D	1	0	0
JUMLAH				89	100

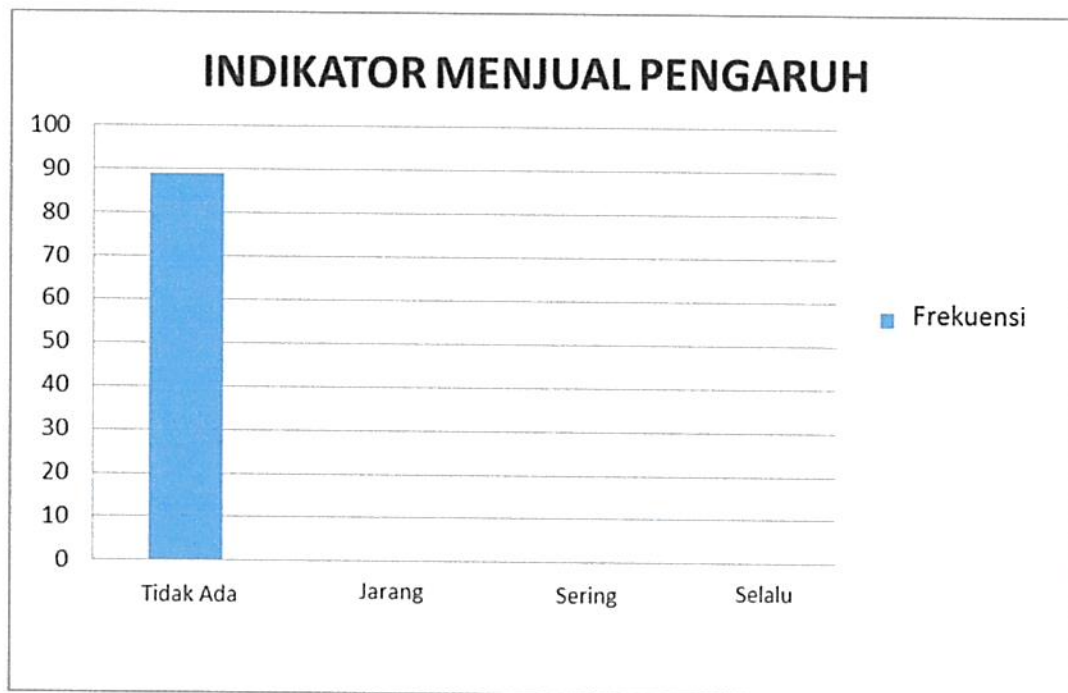


3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil analisis perolehan "89 (100%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Tidak Pernah (A)" pada index rata – rata skor sebesar "4,00" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 11.
Indeks pada indikator menjual pengaruh

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	89	100
2	Jarang	B	3	0	0
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				89	100



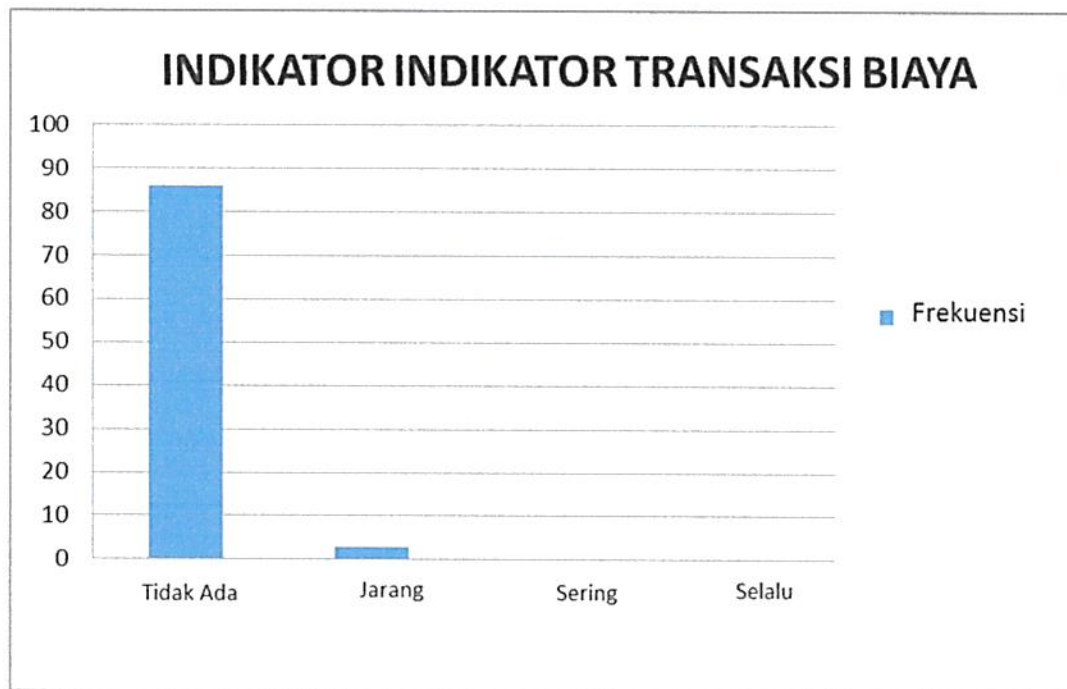
3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan "86 (96,32%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Selalu (A)" pada index rata – rata skor sebesar "3,96" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 12.

Indeks pada indikator transaksi biaya

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	86	96,32
2	Sering	B	3	3	3,68
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
JUMLAH				89	100



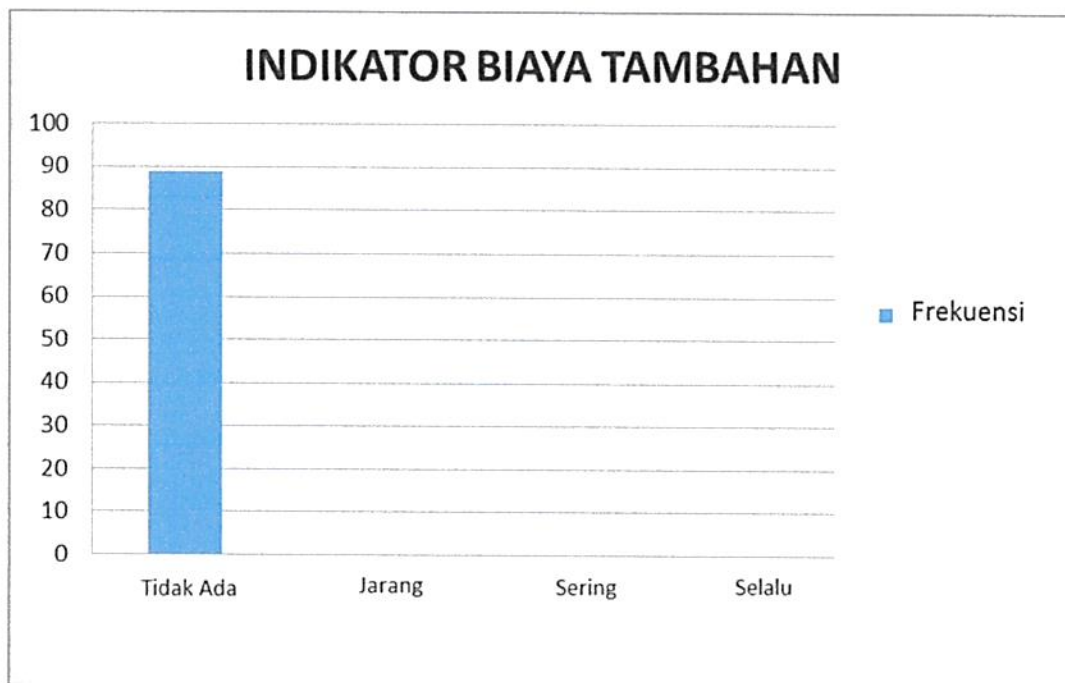
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil analisis perolehan "89 (100%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Selalu (A)" pada index rata – rata skor sebesar "4,00" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	89	100
2	Sering	B	3	0	0
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
JUMLAH				89	100

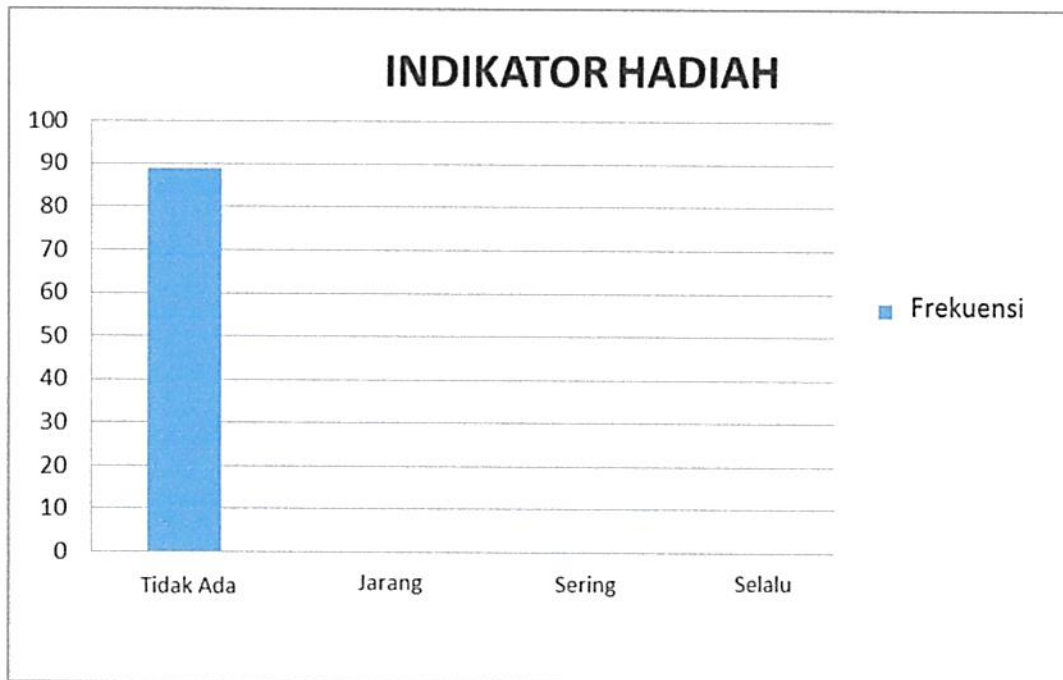


3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan "89 (100%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Tidak Pernah (A)" pada index rata – rata skor sebesar "4,00" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 14.
Indeks pada indikator hadiah

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	89	100
2	Jarang	B	3	0	0
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				89	100



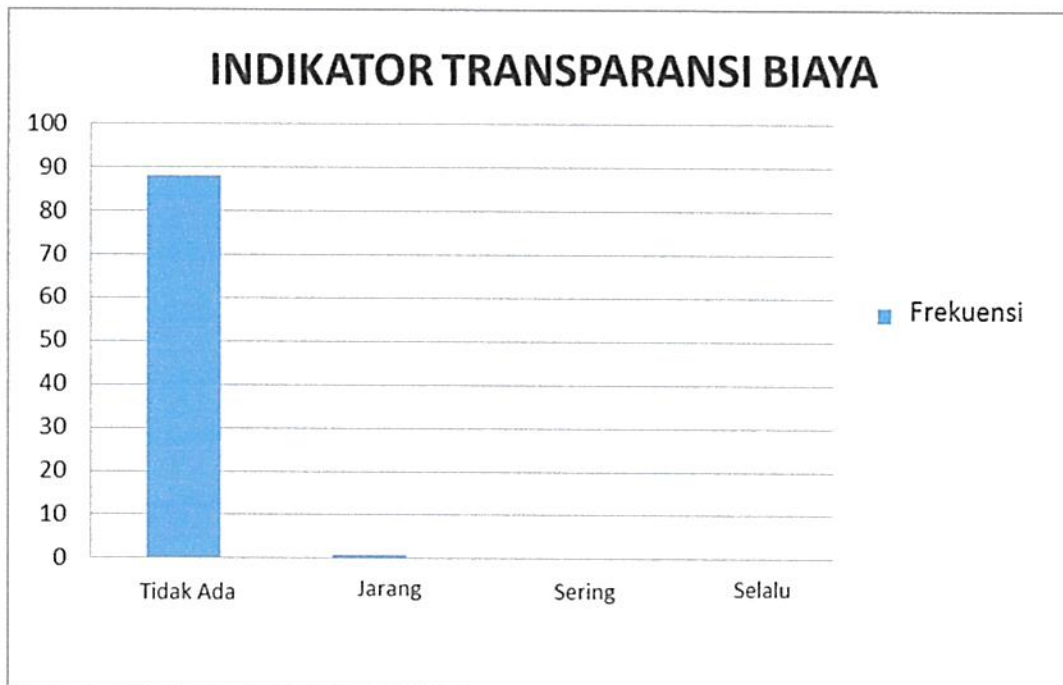
3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan "88 (98,56%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Selalu (A)" pada index rata – rata skor sebesar "3,98" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 15.

Indeks pada indikator transparansi biaya

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	88	98,56
2	Sering	B	3	1	1,12
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
JUMLAH				89	100

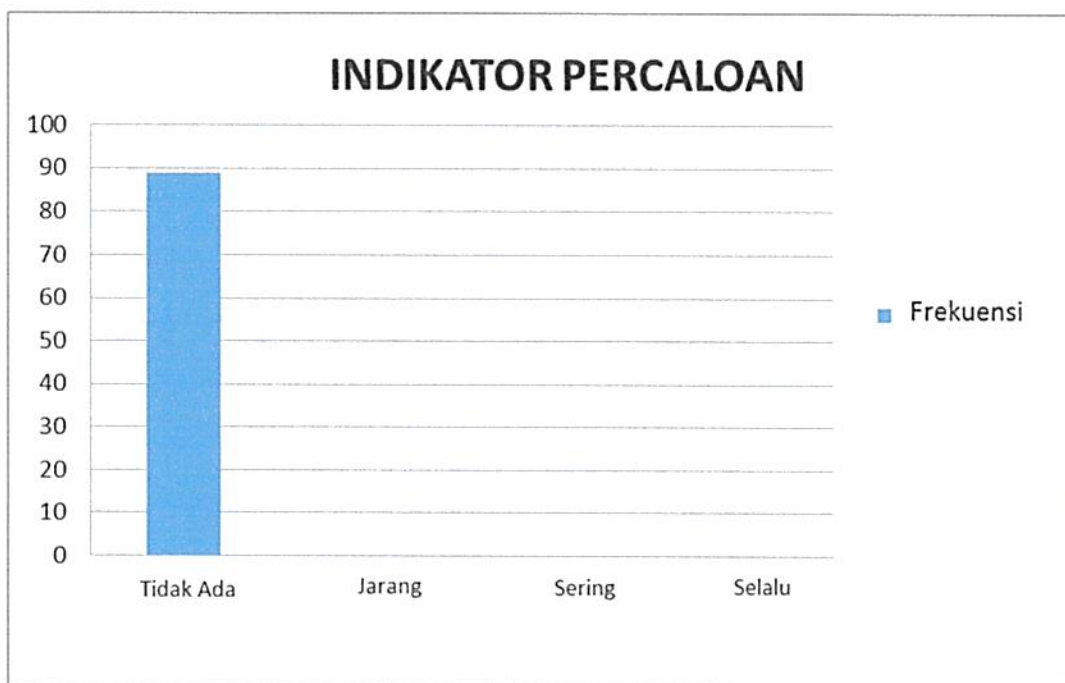


3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan Pembayaran ini menunjukkan hasil analisis perolehan "89 (100%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Tidak Pernah (A)" pada index rata – rata skor sebesar "4.00" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 16.
Indeks pada indikator percaloan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	89	100
2	Jarang	B	3	0	0
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				89	100



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil analisis perolehan "89 (100%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Tidak Pernah (A)" pada index rata – rata skor sebesar "4.00" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 17.
Indeks pada indikator perbuatan curang

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	89	100
2	Jarang	B	3	0	0
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				89	100

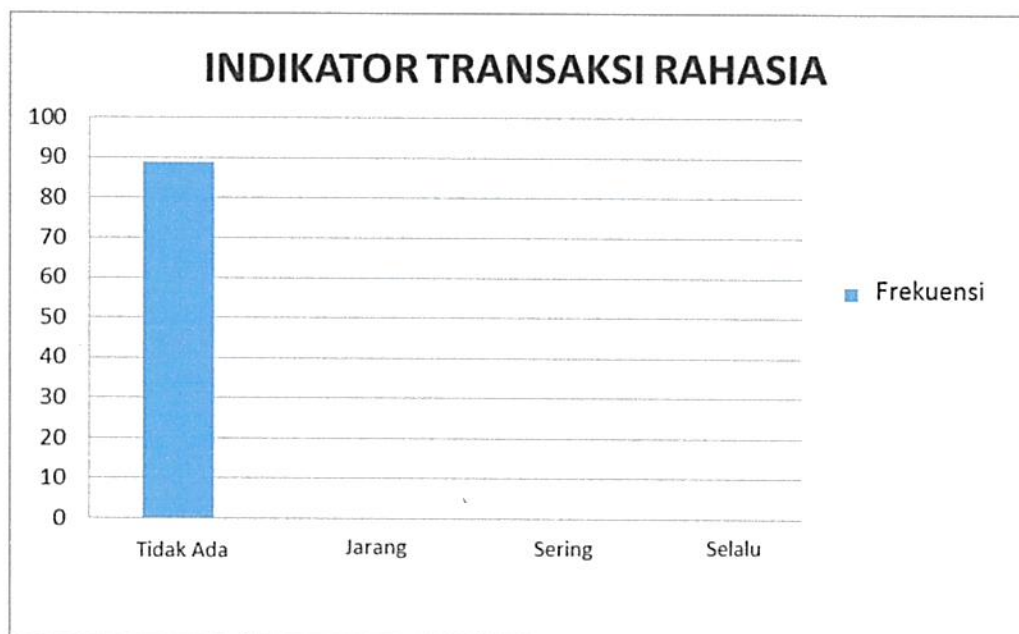


3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil analisis perolehan "89 (100%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Tidak Pernah (A)" pada index rata – rata skor sebesar "4.00" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 18.
Indeks pada indikator transaksi rahasia

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	89	100
2	Jarang	B	3	0	0
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				89	100



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II sebesar "3.99" atau "99,86".

Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II

NO	RUANG LINGKUP	SKOR RATA - RATA	SKOR RATA – RATA TERTIMBANG	KATEGORI
1	Manipulasi Peraturan	3,989	0,399	Sangat Baik
2	Penyalahgunaan	4,00	0,4	Sangat Baik
3	Menjual Pengaruh	4,00	0,4	Sangat Baik
4	Transaksi Biaya	3,966	0,966	Sangat Baik
5	Biaya Tambahan	4,00	0,4	Sangat Baik
6	Hadiah	4,00	0,4	Sangat Baik
7	Transparansi Biaya	3,989	0,399	Sangat Baik
8	Percaloan	4,00	0,4	Sangat Baik
9	Perbuatan Curang	4,00	0,4	Sangat Baik
10	Transaksi Rahasia	4,00	0,4	Sangat Baik
Jumlah Skor Rata – Rata Tertimbang			3.99	
IPK			99,86	

Indeks “99,86” tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan “SANGAT BAIK”. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka “81.26 – 100.00”

Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan

upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II
1	Semoga Pn Pengkalan Balai Lebih Baik Lagi

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi "99,86" atau "3.99" dan masuk pada kategori "Sangat Baik"

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,989 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,966 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,989 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks dengan persepsi kategori Sangat Baik. Namun dari

sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Transaksi Biaya, Manipulasi Peraturan dan Transparansi Biaya** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Segenap warga Pengadilan Negeri Pangkalan Balai harus selalu berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dengan selalu mempedomani *Standard Operating Procedure* (SOP) dan juga selalu berkomitmen dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

LAMPIRAN

TAMPILAN APLIKASI SISUPER PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

FORM DATA RESPONDEN

FORM KUESIONER

Survey Penerima Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan pengadilan.

Data Responden
Nama:

Layanan
Layanan

Form Kuesioner
Isian form kuisioner SPK

Kesan & pesan
mohon isi kesan dan pesan Anda

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

- Tidak Sesuai Prosedur
- Jarang Sesuai Prosedur
- Sering Sesuai Prosedur
- Selalu Sesuai Prosedur

2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyelaragaman jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?

- Petugas melayani selalu meminta imbalan
- Petugas melayani sering meminta imbalan
- Petugas melayani jarang meminta imbalan
- Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3. Pemakaian hubungan oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/diaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?

- Tidak Pernah
- Jarang
- Sering
- Selalu

5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

- Tidak Pernah
- Jarang
- Sering
- Selalu

6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?

- Tidak Pernah
- Jarang
- Sering
- Selalu

8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Pengadilan ?

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staf Pengadilan di luar persidangan ?

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

FORM LAYANAN

Data Responden
Masukkan data responden

Layanan
Layanan

Form Kuesioner
Isi form kuesioner SDA

Kesan & pesan
Masukkan kesan dan pesan Anda

Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan *

Pernah Menerima Layanan Ini sebelumnya ? *

FORM KESAN & PESAN

Data Responden
Masukkan data dari responden

Layanan
Layanan

Form Kuesioner
Isi form kuesioner SDA

Kesan & pesan
Masukkan kesan dan pesan Anda

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami disini.

Terima kasih karena telah mengisi Form Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Klik Kotak dibawah 'Saya bukan robot' sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

Saya bukan robot

Simpan Data

HASIL SURVEY IPAK TRIWULAN III PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NILAI INDEKS

3,99 / 99,86 %

Periode 1 Juli 2022 sampai 30 September 2022

JUMLAH	89 RESPONDEN
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 67 ORANG PEREMPUAN : 22 ORANG
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG Diploma 2 : 0 ORG Diploma 3 : 2 ORG S1 : 29 ORG S2 : 6 ORG S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	SWASTA : 8 ORG WIRUSAHA : 12 ORG TENAGA KONTRAK : 0 ORG LAINNYA : 60 ORG PNS : 5 ORG TNI : 0 ORG POLRI : 4 ORG

DATA UMUR RESPONDER IPAK TRIWULAN III DARI APLIKASI SISUPER

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
		Jumlah (Orang)			% (Persen)
	18 - 28 Th	30			33,71
	29 - 39 Th	32			35,96
	40 - 49 Th	17			19,10
	50 - 59 Th	10			11,24
	60 - 69 Th	0			0,00
	Total	69			

DATA NILAI PER UNSUR IPAK TRIWULAN III DARI APLIKASI SISUPER

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur						
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	355	356	356	353	356	356	355	356	356	356	
NRR Per RL	3.989	4.000	4.000	3.966	4.000	4.000	3.989	4.000	4.000	4.000	39.944
NRR Tertimbang	0,399	0,400	0,400	0,397	0,400	0,400	0,399	0,400	0,400	0,400	3,994
IPAK Unit Pelayanan											3,99

TIGA UNSUR TERENDAH

EVALUASI NILAI UNSUR			3 Unsur Tertinggi	Nilai
No.	Unsur			
1	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?			353
2	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?			355
3	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNSP)			355

TIGA UNSUR TERTINGGI

EVALUASI NILAI UNSUR			3 Unsur Tertinggi	Nilai
No.	Unsur			
1	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?			356
2	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?			356
3	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?			356